

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU

Email: [skipmbaubau@yahoo.com]

RENCANA KERJA TAHUNAN Tahun Anggaran 2024



KATA PENGANTAR

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2023 adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b) pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d) pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Adapun upaya yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Baubau untuk mewujudkan fungsi tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen rencana kinerja tahunan (RKT). RKT Stasiun KIPM Baubau Tahun 2024 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang terdiri dari arah kebijakan, target yang akan direncanakan akan dicapai Stasiun KIPM Baubau pada tahun anggaran 2024 .

Demikian RKT Stasiun KIPM Baubau Tahun 2024 disusun supaya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Baubau, Januari 2024

Kepala, SKIPM Baubau



Yuni Irawati Wijaya

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka pembangunan BPPMHKP merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan.

BPPMHKP yang mempunyai peran di antaranya melakukan sertifikasi terhadap hasil budidaya, penangkapan maupun penanganan dan pengolahan. Tak hanya itu, BPPMHKP juga melaksanakan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan melalui proses inspeksi terhadap sistem yang diterapkan oleh unit produksi dan penanganan atau pengolahan, sedangkan pengawasan mutu dilakukan melalui proses surveilan dan monitoring dalam rangka melihat konsistensi penerapan sistem di unit tersebut.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif (tariff barrier) dalam perdagangan hasil perikanan antar Negara. Keadaan ini memicu masing-masing Negara, termasuk mitra dagang seperti : Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, China, Rusia dan Canada, semakin persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (*health, quality and safety assurance*) yang mengacu pada konsepsi *hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan prinsip ketelusuran (*traceability*) sebagai instrument pengendalian perdagangan.

Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam "*Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitary Measure*" (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis (khususnya karantina dan keamanan pangan) guna melindungi kesehatan manusia hewan, ikan dan tumbuhan. Konsepsi *Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement* merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*) / hambatan *non tariff (non tariff barrier)*. Untuk itu pengembangan system jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya

saing hasil perikanan dalam era perdagangan global. Dengan demikian peran BPPMHKP sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan

1.2. Tujuan

Tujuan di susunnya Rencana Kerja Tahunan Stasiun KIPM Baubau Tahun 2024 adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Stasiun KIPM Baubau tahun 2024 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun KIPM Baubau pada tahun 2024.

1.3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan Stasiun KIPM Baubau adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Baubau Tahun Anggaran 2024 sebagai tindak lanjut dari RPJM Stasiun KIPM Baubau Tahun 2019 – 2024 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga(RKA-KL) Stasiun KIPM Baubau Tahun Anggaran 2024 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun KIPM Buabau pada tahun 2024.

BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam "Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional"

Serta menetapkan misi antara lain :

1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahterah, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kontribusi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan terhadap pembangunan kelautan dan perikanan diwujudkan dalam jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan guna meningkatkan produktifitas maupun dalam meningkatkan daya saing. Adanya perubahan tatanan global serta nasional yang dinamis semakin menuntut tersedianya hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman dikonsumsi. Sehubungan dengan itu, selaras dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai

dengan fungsi dan peran BPPMHKP dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan. Meningkatkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.

2.1.2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan pada tahun anggaran 2024. Indikator kinerja BPPMHKP seiring dengan implementasi kinerja berdasarkan *Balanced scorecard* (BSC) pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator kinerja program BPPMHKP tahun 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	1	Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor (negara)	140
		2	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)	99
		3	Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI (lokasi)	80
		4	Unit penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	500
		5	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (produk)	3.000
		6	Nilai PNBK BPPMHKP (Miliar Rupiah)	55,88
		7	Tenaga kerja yang terlibat di bidang karantina dan pengendalian mutu (orang)	82.500
2	Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP (indeks)	3,65
		9	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit (%)	100
		10	Rasio pengendalian ekspor dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi (%)	90
		11	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan (%)	81

		12	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ika, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan (%)	95
		13	Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity (unit)	800
		14	Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (<i>Official Control</i>) Lingkup Otoritas Kompeten (unit)	50
		15	Metode dan parameter uji yang dikembangkan oleh laboratorium acuan dan laboratorium penguji (parameter uji)	77
		16	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi (lokasi)	400
3	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	17	Unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup BPPMHKP (unit)	29
		18	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BPPMHKP (nilai)	3,3
		19	Indeks Profesionalisme ASN BKIPM lingkup BPPMHKP (indeks)	86
		20	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP (nilai)	82
		21	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BPPMHKP (%)	≤0,5
		22	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP (%)	80
		23	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik BPPMHKP (%)	76
		24	Persentase unit kerja BPPMHKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		25	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP (nilai)	93,76
		26	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPPMHKP (nilai)	86
		27	Tingkat efektivitas pelaksanaan Program Prioritas/strategis lingkup BPPMHKP (%)	80
		28	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BPPMHKP (%)	80
		29	Tingkat kepatuhan BMN lingkup BPPMHKP (%)	80
		30	Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BPPMHKP (%)	100

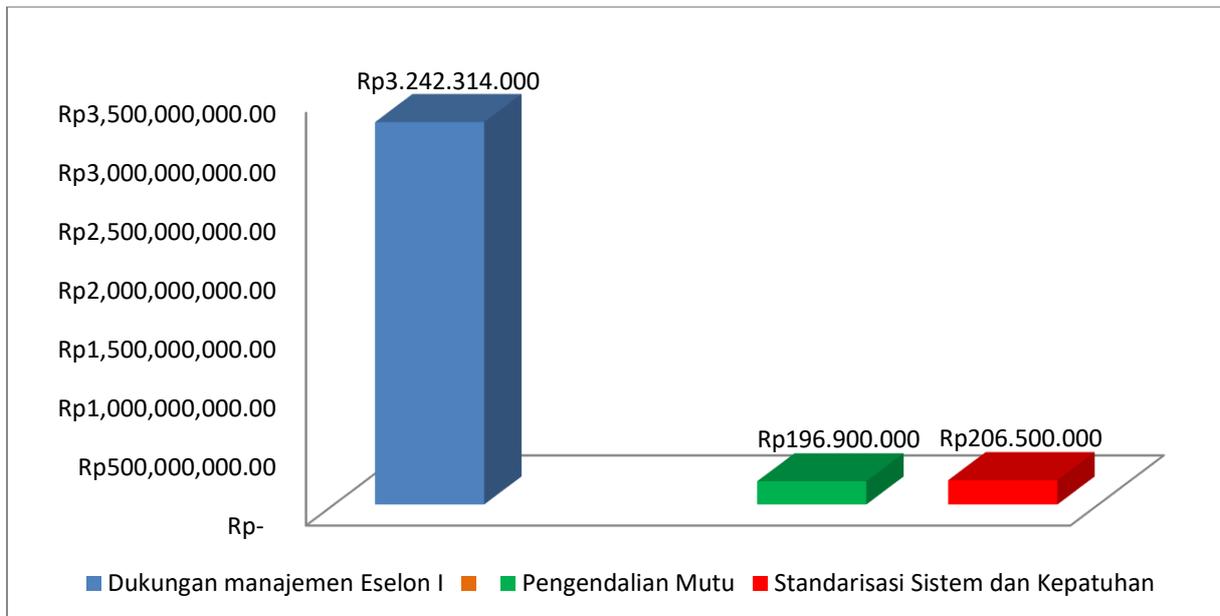
Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat, UPT dan Dekontrasi.

2.2. Rencana Kerja dan Anggaran Stasiun KIPM Baubau

Rencana kerja dan anggaran Stasiun KIPM Baubau tahun 2024 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang sudah ditargetkan dan pelaksanaan programnya inovatif serta rencana kerja Stasiun KIPM Baubau dalam mendukung visi kementerian kedaulatan perikanan. Alokasi anggaran pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun anggaran 2024 sebesar **Rp.3.645.714.000**. alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Stasiun KIPM Baubau untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan rekofusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dapat dilihat pada grafik 1 dan 2 sebagai berikut :





2.2. Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun KIPM Baubau

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun KIPM Baubau Tahun 2024 yang disusun adalah sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan Lingkup SKIPM Baubau (sertifikat)	3
		2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup SKIPM Baubau(Lokasi)	2
		3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Baubau (produk)	10
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup SKIPM Baubau(UPI)	2

Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan					
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantinaan, Mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	<td>Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Baubau (nilai)</td> <td>84</td>	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Baubau (nilai)	84
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM					
SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	6	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup SKIPM Baubau (Indeks)	84	
		7	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker SKIPM Baubau	85	
		8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup SKIPM Baubau (%)	100	
		9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Baubau (%)	75	
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM Baubau (Nilai)	93.75	
		11	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup SKIPM Baubau (Nilai)	82	
		12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Baubau (%)	77,5	
		13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup SKIPM Baubau (%)	77,5	

BAB III. PENUTUP

Program kerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada TA 2024 diimplementasikan dalam rangka penerapan kinerja berbasis balanced scorecard (BSC) yang dilakukan oleh kementerian kelautan dan perikanan. Pelaksanaan program BPPMHKP ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis antara lain :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat KP
2. Terwujudnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam ekspor, impor dan antar area.
3. Terselenggaranya system perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan yang sesuai standar.
4. Terwujudnya aparatur sipil Negara BPPMHKP yang kompeten, profesional dan berintegritas.
5. Tersedianya manajemen pengetahuan BPPMHKP yang handal dan mudah diakses.
6. Terwujudnya birokrasi BPPMHKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.
7. Terkelolanya anggaran pembangunan BPPMHKP secara efisien dan akuntabel.

Total rencana alokasi anggaran pembangunan SKIPM Baubau pada tahun 2024 sebesar **Rp.3.645.714.000** alokasi anggaran tersebut terdiri dari :

1. Belanja pegawai dan oprasional perkantoran sebesar Rp.1.671.660.000
2. Dukungan manajemen sebesar Rp. 3.242.214.000
3. Prioritas (stakeholder dan penambahan asset) sebesar Rp. 0